

Relasi Islam dan Kekuasaan dalam Perspektif Hamka

H. Shobahussurur*

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang pemikiran Buya Hamka yang berpendapat salah satu prinsip dasar dalam menegakkan kekuasaan adalah kebebasan atau kemerdekaan. Buya Hamka menjelaskan bahwa kemerdekaan itu artinya bebas mengembangkan sayap, menurutkan kemauan hati, untuk membuktikan adanya hak. Setiap orang mendapat hak untuk bersidang dan berkumpul, hak berbicara dan menyatakan pendapat, hak berserikat dan mengatur negeri. Selain itu setiap orang memiliki kewajiban untuk tunduk kepada kehendak umum dengan menekan kepentingan pribadi.

Kemerdekaan memiliki tiga pokok: 1). Merdeka iradah (kemauan), yaitu bebas memerintah, menyuruh, menyarankan dan menganjurkan, dan mencipkan hal-hal yang ma'ruf (baik). 2). Merdeka pikiran, bebas menyatakan pikiran, yaitu melarang, menahan, memprotes, mengoposisi yang mungkar, yang ditentang oleh masyarakat. 3). Kemerdekaan jiwa, yaitu bebas dari rasa takut. Tidak takut miskin, dan tidak sombong lantaran kaya.

Kata kunci: Islam dan kekuasaan, Hamka

Pendahuluan

Dalam wacana pemikiran politik Islam modern, setidaknya ada tiga aliran pemikiran bagi umat Islam dalam hal menyikapi hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Aliran pertama berpendapat bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap yang di dalamnya termuat segala macam aturan yang dibutuhkan manusia, termasuk aturan ketatanegaraan atau politik. Sistem ketatanegaraan yang harus diteladani oleh umat Islam adalah sistem Khulafâ' Râsyidîn. Tokoh-tokoh utama aliran ini antara lain adalah Hasan al-Bannâ, Sayyid Qutb, dan Abû al-'lâ al-Maudûdî. Pemikiran ketiga tokoh ini banyak mempengaruhi pemikiran para pemimpin dan aktifis Islam di dunia Islam,

* Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

termasuk di Indonesia. Aliran kedua berpendapat bahwa Islam adalah agama semata dalam arti hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan tidak mengatur masalah ketatanegaraan. Tokoh aliran ini antara lain Alî Abd al-Râziq dan Thâhâ Husain. Aliran ini banyak ditentang oleh para ulama karena cenderung membawa kepada bentuk negara sekuler yang hendak menyingkirkan agama dari negara. Aliran tengah sebagai jalan tengah dari kedua pendapat di atas menolak pendapat bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan mencakup yang di dalamnya terdapat segala macam peraturan untuk kebutuhan hidup manusia di bumi. Aliran ini juga menolak Islam sebagai agama yang hanya mementingkan ritual dan hanya mengatur hubungan manusia dan Tuhan. Tokoh aliran ini antara lain Muhammad Husein Haykâl.

Untuk kasus Indonesia, Bahtiar Effendy memetakan pola pemikiran Islam ke dalam dua corak pemikiran; yang pertama diwakili oleh para pemimpin dan aktivis Islam pada tahun 1950-an dan 1960-an, dan corak pemikiran generasi baru dan aktivis Islam. Para pendukung dari kedua corak pemikiran tersebut memiliki landasan teologis yang sama yaitu keyakinan akan watak holistik Islam, sebagaimana yang ditunjukkan dalam berbagai sumber utama Islam (antara lain Q.S. al-Nahl/16: 89), hanya saja dalam upaya memahami maksud watak holistik Islam terdapat perbedaan. Para pemimpin dan aktifis Islam Indonesia terdahulu memandang bahwa Islam menyediakan ajaran yang lengkap mengenai semua aspek kehidupan. Bahkan, sudut pandang khusus ini menjadi basis utama pemahaman bahwa Islam tidak mengakui pemisahan antara agama dan negara, antara yang transendental dan yang temporal. Islam telah menyediakan bagi pemeluknya sebuah konsep negara atau sistem pemerintahan yang lengkap, bahkan sebagian mereka berpandangan bahwa negara pada hakekatnya merupakan bagian integral, atau perluasan dari Islam. Islam adalah agama sekaligus negara (*al-Islâm al-dîn wa al-dawlah*), sehingga cukup dapat dimengerti bila mereka memperjuangkan dijadikan Islam sebagai dasar negara. Generasi baru pemikiran politik Islam tetap berkeyakinan benarnya pandangan mengenai watak Islam yang holistik.

Namun watak holistik Islam tidak serta merta mengharuskan pencampuran antara yang sakral (nilai-nilai Islam) dan yang profane (negara, organisasi politik, ideologi, dan sebagainya). Keduanya tidak harus ditempatkan pada tingkat yang sama. Meskipun Islam tidak mengakui gagasan pemisahan antara kedua wilayah itu, keduanya dapat – dan bahkan harus – dibedakan.¹

Namun setelah reformasi, muncul para pemimpin dan aktifis Islam yang berupaya memperjuangkan watak holistik Islam itu kepada makna yang sesungguhnya. Hal itu karena apa yang dilakukan oleh “generasi baru”, sebagaimana istilah yang digunakan Bahtiar Effendy, dianggap sebagai tidak mencitrakan ajaran Islam yang lengkap, bahkan dianggap sebagai kurang semangat, atau bahkan tidak punya gairah untuk memperjuangkan misi Islam. Maka generasi baru ini dianggap justru cenderung kepada bentuk negara sekuler yang berakibat mandulnya peran Islam dalam ketatanegaraan. Oleh karenanya muncul para pemimpin dan aktifis Islam yang mengikuti dan kembali meneladani corak pemikiran pertama dengan berbagai inovasi dan pembaharuan.

Buya Hamka berpandangan bahwa Islam adalah meliputi seluruh kegiatan hidup manusia. Islam tidak saja membahas masalah ibadah makhluk kepada Tuhannya, tidak pula hanya membahas tentang politik saja, yakni membahas hubungan antara seorang dengan masyarakat, Islam bukan pula hanya urusan ulama atau kepala-kepala agama. Islam meliputi seluruh aspek kehidupan.²

Lebih lanjut Buya Hamka menjelaskan bahwa ajaran Islam paling pokok adalah tauhid, yaitu mengakui akan keesaan Tuhan, satu kekuasaan tertinggi, satu pengatur alam raya. Selain Tuhan adalah makhluk atau benda belaka. Seluruh aktifitas manusia selama hidup ini bertujuan untuk mencari atau mengusahakan agar semua aktifitasnya itu mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Esa. Semua manusia berkedudukan sama di mata Tuhan.

¹ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta : Paramadina, 1998), p. 176-179.

² Hamka, *Falsafah Hidup*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1994), p. 279

Tidak ada perbedaan warna kulit, atau diskriminasi ras. Tidak ada perbedaan karena keturunan. Makhluk paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertaqwa kepada-Nya. Hak dan kewajiban semua manusia sama, tidak dibeda-bedakan. Setiap orang harus berusaha meningkatkan kualitas imannya. Setelah itu, berusaha meningkatkan kualitas iman dalam lingkungannya dalam sekup yang paling kecil (keluarga) meluas hingga tetangga, kampung, negeri, sampai ke tingkat negara dan dunia.

Agama Islam adalah agama untuk mengatur dan mengurus segala segi dari kegiatan masyarakat, baik hubungan makhluk dengan Tuhannya, atau antara makhluk dengan makhluk lain. Ke bawah adalah kesatuan manusia, dan ke atas adalah kesatuan Tuhan. Tidak ada hak suatu golongan untuk menindas golongan lain. Semua sama di hadapan Tuhan karena jiwa seseorang dihargai karena pengabdianya. Namun Islam tidak mengenal sistem kependetaan (*lā rabbāniyyata fī al-Islām*). Para ulama dalam Islam hanyalah predikat keahlian bukan golongan yang berkuasa. Ulama bukanlah penguasa istimewa.

Oleh karenanya, Buya Hamka menolak bentuk negara Tuhan (teokrasi), seperti halnya dia menolak bentuk demokrasi liberal dalam pandangan Barat. Maka kekuasaan negara dalam pandangan Islam adalah kekuasaan yang dibentuk dari hasil musyawarah dari segenap lapisan masyarakat berdasarkan keadilan, kebebasan, dan kesamaan.³

Islam sebagai Dasar Negara

Pada tahun 1958, dalam sidang-sidang Dewan Konstituante, yaitu dewan pembuat undang-undang hasil pemilihan umum 1955, terjadi suatu perdebatan serius mengenai dasar negara. Ada yang menghendaki dasar negara Islam, diusung oleh partai-partai Islam, seperti Masyumi, Nahdlatul Ulama, Perti dan Sarekat Islam. Ada yang menghendaki tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, yang diusung oleh partai-partai Nasionalis, Komunis, Sosialis, Kristen dan Katolik. Perdebatan mengenai dasar negara itu berujung dengan

³ *Ibid*, p. 280.

dikeluarkannya Dekrit Presiden Soekarno yang berisi antara lain: kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, Demokrasi Terpimpin, dan pembubaran Dewan Konstituante.

Dalam Pemandangannya, Buya Hamka, salah satu anggota Dewan dari Masyumi, menguraikan pentingnya Islam sebagai dasar negara. Beliau memulai pembicaraan dengan mengajak kepada seluruh anggota Dewan untuk mampu bermusyawarah dengan bebas, mengadu argumentasi-argumentasi, lapang dada mendengar pendapat orang lain yang berbeda, untuk kemudian menghasilkan titik pertemuan demi kebaikan bangsa dan negara.

Beberapa alasan yang disampaikan oleh Buya Hamka, kenapa Indonesia harus berdasarkan Islam, antara lain:

1. Semangat Islam, dengan pekik “Allahu Akbar”, adalah yang menjadi pemicu bagi perjuangan membebaskan bangsa dari penjajahan. Yang menjiwai terwujudnya proklamasi kemerdekaan bukan Pancasila, tapi dorongan semangat menegakkan kalimatullah. Api yang menyala dalam dada para pejuang bukanlah Pancasila. Pancasila belum dikenal waktu itu. Api yang menyala adalah api Islam, Allah Akbar. Bangsa Indonesia yang 90 % beragama Islam menginginkan kemerdekaan itu dengan semangat Islam. Maka bila mayoritas menuntut haknya, itu adalah suatu hal yang semestinya.
2. Mewujudkan cita-cita para pejuang kemerdekaan. Bahwa para pejuang itu ingin membebaskan bangsa ini dari penjajahan, dengan cita-cita terbentuknya negara merdeka berdasarkan Islam. Mereka tidak mengenal Pancasila pada saat itu. Buya Hamka menyebut nama-nama pahlawan nasional seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Teuku Tjik Ditiro, Teuku Umar, Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin, Maulana Hasanuddin, Sultan Malaka, Iskandar Muda, Raja Aji, Cokroaminoto guru Bung Karno. Semuanya bercita-cita terwujudnya negara berdasarkan Islam. Sultan Abdulhamid Diponegoro, yang bergelar Khalifatul Muslimin dan Amirul Mukminin, terang-terangan menantang Gubernur Jenderal de Kock bahwa beliau akan mendirikan sebuah kerajaan Islam di tanah Jawa. Imam Bonjol, yang

bernama asli Ahmad Syahab, waktu muda di sebut Peto Syarif, adalah seorang Muallim Besar dan Pemimpin dalam peperangan di Bonjol yang bercita-cita membentuk masyarakat dan negeri berdasar Islam di alam Minangkabau, Adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah. Teuku Cik Ditiro berjuang atas nama Islam. Hassanuddin dari Makassar berjuang untuk menegakkan kalimatullah. Sudah pasti para pejuang itu tidak mengenal Pancasila, karena Pancasila hanya dipopulerkan beberapa tahun terakhir. Maka mendirikan negara berdasarkan Islam, demikian Buya Hamka, adalah melanjutkan cita-cita dari nenek moyang dengan cakupan lebih besar dan lebih bersifat nasional.

3. Islam adalah agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia. Islam telah mengakar dalam kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia berabad-abad lamanya. Islam telah menjadi rahasia kekuatan yang sebenarnya dalam hati sanubari bangsa Indonesia. Pancasila tidak mempunyai dasar sejarah di Indonesia. Sementara itu, Islam telah berkembang di seluruh kepulauan Indonesia sejak 600 tahun lalu. Oleh karenanya perjuangan menuntut Islam sebagai dasar negara adalah perjuangan yang mengakar. Perjuangan untuk kesejahteraan seluruh bangsa, bukan hanya untuk partai-partai Islam, tapi adalah untuk seluruh bangsa Indonesia.
4. Kekhawatiran akan terjadi diskriminasi bila Islam dijadikan dasar negara adalah sangat berlebihan. Sebab dasar politik pertahanan negara berdasarkan Islam adalah menjunjung tinggi kesucian nama Tuhan. Bila negara berdasarkan Islam itu telah terbentuk, maka yang akan merumuskan dan mengatur undang-undang dasarnya bukanlah partai-partai Islam saja, tetapi seluruh partai, termasuk PNI, Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), seluruh partai dan golongan yang konsekwen percaya kepada Tuhan. Maka tidak ada diskriminasi karena semua keputusan dihasilkan melalui musyawarah. Negara berdasarkan Islam tidak

dimaksudkan menjadikan penganut agama lain menjadi bangsa kelas dua.⁴

Buya Hamka melihat memang dalam persidangan-persidangan tentang dasar negara dalam Dewan Konsituat itu terjadi tarik menarik yang begitu kuat. Pihak yang memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara tetap bersikukuh memperjuangkannya, sebagaimana pihak yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Namun Buya Hamka hendak mengingatkan kembali sejarah bangsa ini. Dulu, masyarakat Indonesia seluruhnya adalah masyarakat Islam. Belanda selama 350 tahun berupaya menjauhkan bangsa ini dari tradisi Islam, dengan membentuk pendidikan dan aturan-aturan yang anti Islam.

Dengan jiwa besar Buya Hamka menyatakan akan mengikuti keputusan yang diambil dalam sidang Dewan Konstituante. Bahkan andaikata dengan rasa pahit, sidang tidak menghasilkan apa-apa, Pancasila akan dipertahankan dengan paksa, dan Islam ditolak mentah-mentah, beliau tetap tegar dengan mengatakan: “Walaupun bagaimana kerasnya tolakan atas perjuangan kami yang benar, adil dan logis ini, semua yang menolak itu adalah saudara kami. Semuanya adalah bangsa kami, kawan setanah air, yang telah pernah menghadapi suka-duka sejarah selama 12 tahun, sama bergelimang darah, sama berkuah air mata”. Buya Hamka telah menunjukkan jiwa besarnya sebagai politisi. Beliau berjuang keras mewujudkan cita-cita politiknya dengan segala caranya, tetapi tetap berpegang teguh pada aturan-aturan yang disepakati dalam musyawarah itu. Beliau tunduk kepada hasil keputusan yang diambil secara sah.

Urut Tunggang Pancasila

Buya Hamka memberikan uraian tentang bagaimana seharusnya umat Islam memahami Pancasila. Uraian itu disampaikan dalam bentuk buku kecil, berjudul *Urut Tunggang Pancasila*, terbit tahun 1951, dengan kata pengantar Mohammad

⁴ Yusran R., *Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 2001), p. 97-134.

Natsir. Uraian itu merupakan jawaban atas adanya dugaan bahwa belakangan muncul perjuangan yang hanya berdasarkan ketuhanan (sila pertama), tuduhan dialamatkan kepada parta-partai Islam. Ada yang hanya memakai dasar Keadilan Sosial (sila ketiga), dialamatkan kepada paham sosialis.

Buya Hamka mengakui, bahwa perjuangan umat Islam dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia didasarkan kepada Tauhid, yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seluruh segi kehidupan, dimulai kaum muslimin dari sana. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pengakuan akan adanya kekuasaan di atas seluruh kekuasaan manusia. Ia adalah asas dari satu kepercayaan atas Kesatuan Allah dalam ketuhanan, perbuatan, dan kekuasaan. Ia menyatukan antara manusia, hidupnya, dan alam, kepada hanya satu tuhan, yaitu Allah. Seluruh alam disatukan dengan satu nama, yaitu makhluk (yang diciptakan) Tuhan. Seluruh kehidupan berlangsung atas kehendak dan rahmat dari Tuhan.

Seluruh perjalanan hidup manusia disebut dengan sabilillah (jalan Allah). Seluruh perjuangannya adalah dalam rangka menegakkan jalan Allah itu. Maka bila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan jalan Allah itu, mereka bangkit meluruskan. Hidup mereka adalah pengabdian kepada Allah, dan matinya adalah syahid. Maka para pejuang sejati bangsa ini adalah mereka yang berkeyakinan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perjuangan mereka bukan untuk para pemimpinnya, bukan pula untuk mengejar materi dan kedudukan, tapi semata mengharap ridha dari Tuhan.

Lebih lanjut Buya menguraikan, dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dengan sendirinya manusia memiliki perikemanusiaan yang tinggi. Hanya melalui perikemanusiaan yang tinggi itulah kepercayaan kepada Tuhan diwujudkan. Perikemanusiaan bukan sila yang baru dibuat. Kemanusiaan itu adalah keimanan yang tidak dapat dipisahkan, atau hasil yang tumbuh langsung dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka tanggung jawab atas terjadinya pelanggaran terhadap kemanusiaan bukan kepada manusia, tetapi langsung kepada Tuhan.

Orang yang memegang teguh sila Ketuhanan Yang Maha Esa pasti menuntut keadilan sosial. Orang yang mengabaikan keadilan sosial adalah orang yang mendustakan agama (Q.S. al-Ma'un/107: 1-7), dan dibenci Nabi sebagai orang yang tidak beriman, sebagaimana sabdanya: “Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, Demi Allah tidak beriman”. Lalu ada yang bertanya: “Siapa yang Engkau maksud, ya Rasulullah?”. Beliau menjawab: “Orang yang menyakiti hati tetangganya”. Oleh karenanya, keadilan sosial merupakan implementasi dari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Barangsiapa yang mengaku percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, pasti percaya akan kedaulatan rakyat. Tidak ada manusia yang diberi hak menguasai sesama manusia. Tidak ada diktator dalam masyarakat seperti ini, baik diktator kenegaraan maupun diktator keagamaan. Manusia di dunia ini adalah khalifah Tuhan, wakil Tuhan mengatur dunia. Rakyat itulah yang berdaulat, yang berkuasa. Dialah khalifah Tuhan. Rakyat wajib bermusyawarah dalam memilih pemerintahan yang diinginkan. Kalau ada yang terpilih memegang kekuasaan, maka pemegang kekuasaan itu wajib bermusyawarah pula dengan yang memberinya kekuasaan. Pemegang kekuasaan harus menjalankan kekuasaan dengan adil. Sebaliknya, rakyat yang memberinya kekuasaan harus menjaga jangan sampai kekuasaan itu diselewengkan.

Dengan memegang teguh kepada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila kebangsaan dapat berjalan dengan baik. Buya Hamka memahami bahwa paham kebangsaan Indonesia bukanlah dimaksudkan paham kebangsaan sempit, paham kebangsaan yang buta “Chauvinisme”, paham kebangsaan yang membanggakan kebesaran masa lampau. Paham kebangsaan yang benar, sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah paham bahwa seluruh bangsa adalah kawan, seluruh manusia adalah sahabat, dan tujuan paling akhir adalah perdamaian kemanusiaan menegakkan dunia yang baru yang adil dan makmur.

Akhirnya Buya Hamka berkesimpulan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan urat tunggangnya Pancasila. Karena

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan maknanya yang penuh, maka sila-sila lainnya akan terpelihara. Ketuhanan Yang Maha Esa saja yang menjadi urat tunggang dari segenap sila, entah tumbuh pula sila-sila yang lain lagi, panca sila, sapta sila, atau seribu sila. Karena buatan manusia tidaklah tetap, dan buatan Tuhan sajalah yang tetap.

Menolak Sekularisme

Buya Hamka menolak tegas paham sekularisme yang hendak memisahkan antara agama dan kekuasaan. Beliau menolak sekularisasi yang terjadi di Barat, dan diikuti oleh sebagian negara Islam, seperti Turki, hendak diterapkan di bumi Nusantara ini. Oleh karena itu, beliau dengan gigih memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, sebagaimana penjelasannya dalam sidang Konstituante 1958. Kalaupun Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara, maka Pancasila harus dipahami sebagai dasar yang menjadikan agama sebagai bagian utama dan tidak terpisahkan dari kekuasaan negara. Maka dalam penjelasannya di atas, Buya Hamka, memahami sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai urat tunggang Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan inti dari sila-sila yang lain. Tanpa ketuhanan Yang Maha Esa, sila-sila yang lain tidak berarti apa-apa. Dan dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yang Maha Esa, sila-sila yang lain itu akan mengikuti. Ketuhanan Yang Maha Esa, kata Buya, adalah sumber hakiki dari segala sila dan kesusilaan.

Sekularisme di Barat terjadi karena mereka merasa dan mengalami bahwa agama Kristen tidak memberikan ajaran tentang pentingnya mendirikan kerajaan dunia ini. Ajaran mereka tentang negara yang utama adalah “Kerajaan Allah yang di surga”. Kalau satu masa kaum gereja atau pendeta berkuasa, maka mereka berlaku kejam atas nama Tuhan.

Sekularisme Barat timbul setelah melalui jaman *renaissance*, kaum duniawi berjuang membebaskan diri dari kungkungan gereja yang dianggap selalu menghalangi kemajuan berpikir. Sekularisme timbul, karena ketika agama dibawa dalam pemerintahan, Gereja berkuasa, selalu terjadi kerusuhan dan huru

hara agama yang tidak ada habis-habisnya. Itulah yang mereka alami dalam peperangan Katholik-Protestan dalam abad 16-17. Sekularisme mencapai puncaknya yang radikal dengan tumbuhnya paham komunisme; persetan tuhan, persetan agama. Akhirnya, menghilangkan agama, atheis (*la diniyyah*).

Uji coba sekularisasi di Turki yang hendak memisahkan agama dari negara, hendak meniru Barat bahkan lebih, terbukti gagal. Buya Hamka mencontohkan kemenangan Jalal Bayar di Turki dengan Partai Demokratnya atas Ismet Inonu dari Partai Republik peninggalan Kemal Attaturk. Kesuksesan Bayar diraih karena selama masa kampanye dia berjanji kalau menang, praktik-praktik ibadah, seperti azan dalam bahasa Turki, akan dikembalikan seperti semula, dengan bahasa Arab. Jalal Bayar menang. Ketika pertama kali azan dialunkan kembali dengan bahasa Arab, banyak orang sujud syukur di tengah jalan.⁵

Sekularisme yang ingin diterapkan dalam masyarakat Islam seperti Turki gagal, karena tidak mendapatkan urat tunggang dalam masyarakat Turki yang teguh menjalankan agama, demikian ungkap Buya Hamka. Bila kemudian sekularisme itu hendak dipaksakan pula di Indonesia, bukan kemajuan yang akan diraih, tapi kemunduran dan keterpurukan yang akan melanda bumi Pertiwi ini, sebuah negeri yang penduduknya teguh mempertahankan agamanya.

Namun bila semangat mempertahankan agama sudah surut, pasti paham sekularisme akan dengan mudah mempengaruhi pola pikir bangsa Indonesia. Buya Hamka mengutip anjuran Bung Hatta bahwa umat Islam sebagai golongan mayoritas di negeri ini, harus giat memperhebat, memperdalam, dan memperluas ajaran Islam. Bila pengaruh Islam bertambah besar, corak negara ini tidak akan lain daripada Islam. Oleh karenanya, Buya berharap agar pengalaman perjuangan selama ini memperteguh keyakinan kita bahwa negara yang diduduki oleh mayoritas umat Islam haruslah negara yang berjiwa Islam laksana tubuh dengan nyawa atau laksana kuku

⁵ Hamka, *Dari Hati ke Hati tentang Agama Sosial Budaya Politik*, (Jakarta : Panjimas, 2002), p. 271.

dengan daging. Tercapai atau tidak cita-cita itu sangat tergantung kepada diri kita: “Sudahkah saya mengerti, dan sudahkah saya benar-benar menjadi orang Islam?”⁶

Catatan Akhir: Prinsip Dasar dalam Menegakkan Kekuasaan

Buya Hamka berpendapat bahwa untuk segala urusan yang bersifat duniawi (muamalat), yaitu hal-hal yang berhubungan antara seorang dengan orang lain, keluarga dengan keluarga, atau negara dengan negara yang lain, maka Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya demi kemaslahatan mereka. Hal itu berdasarkan sabda Nabi Muhammad s.a.w.: “Kamu lebih tahu tentang segala urusan dunia kamu”.⁷

Manusia diberi kebebasan mengatur susunan masyarakat sesuai dengan pilihan mereka. Islam hanya memberikan prinsip-prinsip dasar agar dalam mengatur masyarakat terdapat rambu-rambu yang jelas. Prinsip yang utama adalah *syura* (musyawarah). Dengan musyawarah, maka masyarakat itu tidak statis, beku, tetapi menjadi dinamis maju menuju sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan, kebebasan, dan kesamaan. Agar musyawarah tersebut dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang membawa maslahat manusia, maka dipilahlah orang-orang yang dapat mewakili masyarakat karena ketokohan dan keilmuannya. Mereka itu disebut *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* (ahli mengurai dan mengikat), yaitu mereka yang dapat bermusyawarah untuk memberikan solusi dan mengurai problem serta membuat aturan-aturan untuk mengikat masyarakat menuju tatanan masyarakat yang baik. *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* itu kemudian memilih dan menetapkan pemimpin negara yang bertugas menjaga keamanan jiwa (yang kuat jangan sampai menindas yang lemah), keamanan harta benda (jangan sampai yang kuat merampas hak milik orang lain, supaya tidak terjadi

⁶ Hamka, *Falsafah Hidup*, p. 278.

⁷ *Ibid*, p. 279. Baca juga Badiatul Raziqin dkk, *1001 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, (Yogyakarta : e-nusantara, 2009), p. 188-193.

percurian dan perampokan), keamanan keturunan (jangan sampai ada hubungan laki-laki perempuan di luar nikah), dan keamanan agama (jangan ada orang yang menghalangi orang lain menjalankan ibadah).⁸

Pemimpin yang dipilih *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* dapat disebut sultan, khalifah, imam, presiden atau yang lainnya, sesuai dengan hasil musyawarah. Al-Quran dan Hadits tidak menetapkan sebutan gelar-gelar itu. Semuanya diserahkan kepada forum musyawarah. Islam hanya memberikan prinsip-prinsip dasar bagi terwujudnya kekuasaan negara yang benar. Selain prinsip utama yaitu syura (musyawarah), terdapat pula prinsip-prinsip dalam al-Quran tentang penyelenggaraan pemerintahan, antara lain: keadilan, kebebasan, dan kesamaan. Prinsip syura dalam al-Quran dapat ditelusuri antara lain: Q.S. 'Alî Imrân/3: 159, dan al-Syûrâ/42: 38. Prinsip keadilan dalam al-Quran dapat ditelusuri antara lain dalam: Q.S. al-Nisa'/4: 58, 105, 135, al-Mâidah/5: 5, 42, al-An'âm/6: 157, 160, al-A'râf/7: 29, 181, Hûd/11: 85, al-Nahl/16: 90, Thâhâ/20: 112, dan al-Hadîd/57: 25). Prinsip kebebasan antara lain dalam: Q.S. al-Kahfi/18: 29, al-Rûm/30: 44, Fushshilat/41: 46, al-Jâtsiyah/45: 15, dan al-Kâfirûn/109: 1-6). Prinsip kesamaan antara lain dalam: Q.S. al-Taubah/9: 13, al-Kahfi/18: 110). Selain itu juga ada prinsip kekuasaan sebagai amanah (Q. S. al-Baqarah/2: 283, al-Nisâ'/4: 58, dan al-Anfâl/8: 27), prinsip kesejahteraan (Q..S. Saba'/34: 15), prinsip perlindungan hak azasi manusia (Q.S. al-Nisâ'/4: 4: 32, al-Mâidah/5: 32, al-Isrâ'/17: 33, 70, Qâf/50: 45, dan al-Ghâsiyah/88: 21-22), prinsip kerjasama (al-Baqarah/2: 153, dan al-Mâidah/5: 2), dan prinsip perdamaian (al-Baqarah/2: 190, 194, al-Nisâ'/4: 128, al-Anfâl/8: 61-62, dan al-Taubah/9: 10).

Buya Hamka mengartikan keadilan sebagai tegak di tengah. Tegak di tengah ketika mengatur, memimpin, atau melakukan transaksi. Tidak memihak kepada salah satu, mengabaikan yang lain. Keadilan mengandung tiga unsur, yaitu: persamaan, kemerdekaan, dan hak milik.

⁸ *Ibid*, p. 280.

Persamaan adalah hak segenap manusia. Karena kejadian manusia itu sama, maka keperluan hidup juga sama. Maka mereka harus mendapat hak yang sama dalam hidup dan di muka undang-undang. Oleh karena itu penguasa berkewajiban memajukan berbagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.⁹

Salah satu prinsip dasar dalam menegakkan kekuasaan adalah kebebasan atau kemerdekaan. Buya Hamka menjelaskan bahwa kemerdekaan itu artinya bebas mengembangkan sayap, menuruti kemauan hati, untuk membuktikan adanya hak. Setiap orang mendapat hak untuk bersidang dan berkumpul, hak berbicara dan menyatakan pendapat, hak berserikat dan mengatur negeri. Selain itu setiap orang memiliki kewajiban untuk tunduk kepada kehendak umum dengan menekan kepentingan pribadi.

Menurut Buya Hamka, kemerdekaan memiliki tiga pokok: 1). Merdeka iradah (kemauan), yaitu bebas memerintah, menyuruh, menyarankan dan menganjurkan, dan menciptakan hal-hal yang ma'rif (baik). 2). Merdeka pikiran, bebas menyatakan pikiran, yaitu melarang, menahan, memprotes, mengoposisi yang mungkar, yang ditentang oleh masyarakat. 3). Kemerdekaan jiwa, yaitu bebas dari rasa takut. Tidak takut miskin, dan tidak sombong lantaran kaya.¹⁰

Hak milik dalam kekuasaan negara yang benar harus dilindungi undang-undang. Pemerintah tidak boleh mencampuri hak milik orang. Pada zaman kegelapan Eropa, rakyat tidak memiliki apa-apa. Kepemilikan atas tanah dan rumah adalah raja atau tuan tanah (para feodal). Raja berhak mengambil tanah atau rumah yang disukai. Rakyat tidak boleh melawan. Dalam undang-undang keadilan, rakyat berhak memperkarakan raja di muka undang-undang bila mengambil hak milik rakyat secara tidak sah.

Dengan prinsip-prinsip itu kekuasaan negara ditegakkan. Al-Quran dan Sunnah telah memberikan prinsip-prinsip itu untuk dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁹ *Ibid*, p. 260-261.

¹⁰ Yusran R, *Debat Dasar Negara...*p. 156-157.

Bangsa Indonesia yang sejak berabad-abad lamanya hidup dalam bimbingan agama yang kuat, tidak mungkin dijauhkan dari agamanya. Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia sejak lama telah membentuk pola hidup, tradisi, budayanya sendiri. Maka kekuasaan negara di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai dan prinsip dasar Islam. Indonesia modern harus dibangun di atas nilai-nilai Islam. Upaya menjauhkan Islam dari negara tidak saja menyalahi latar belakang sejarah dan tradisi bangsa, tapi juga akan meruntuhkan bangunan negara ini yang dengan susah payah, dengan linangan air mata dan kucuran darah, telah dibangun dan diperjuangkan oleh para pejuang bangsa.

Daftar Pustaka

- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Hamka, *Falsafah Hidup*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1994.
- _____, *Ayahku*, Jakarta : Umminda, 1982.
- _____, *Kenang-kenangan Hidup*, Jakarta.1979.
- _____, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 1-30, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1982.
- _____, *Lembaga Hidup*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1984.
- _____, *Dari Hati ke Hati tentang Agama Sosial Budaya Politik*, Jakarta : Panjimas, 2002.
- Rozikin, Badiatul, dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, Yogyakarta: e-Nusantara, 2009.
- Yusran R., *Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 2001.